

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA: (Analisis Keterlibatan dalam Voting, Kampanye, Diskusi Politik, serta Kendala Kultural dan Struktural Politik)

Yuyun J. Bare'e

Prodi PKN, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Email:

yuyunbaree9@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze women's political participation in village head elections, focusing on their involvement in voting, campaigning, and political discussions, while also identifying cultural and structural barriers that influence their participation. The study was conducted in Domag Village, Buol Regency, within the context of the 2020 Village Head Election, using a qualitative research approach. The findings reveal that women's political involvement remains largely limited to voting. Meanwhile, their participation in political decision-making, campaigning, and discussions remains minimal. Two main factors shape the level of women's political participation: cultural and structural factors. From a cultural perspective, women's decisions to participate in politics are often influenced by cultural traditions, religious beliefs, and the social status of the village head candidates. Meanwhile, from a structural perspective, socioeconomic conditions and education levels play a crucial role in shaping women's awareness and confidence to actively engage in politics. In conclusion, although women in Domag Village are relatively active in exercising their voting rights, their involvement in other political activities remains low. Therefore, strategic efforts are needed to enhance political awareness and empower women so that their participation extends beyond voting to broader political engagement in various political processes.

Keywords: Political Participation, Women, Cultural Barriers, Structural Challenges.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala desa, dengan fokus pada keterlibatan mereka dalam memberikan suara (voting), kampanye, serta diskusi politik, sekaligus mengidentifikasi kendala kultural dan struktural yang memengaruhi partisipasi tersebut. Studi ini dilakukan di Desa Domag, Kabupaten Buol, dalam konteks Pemilihan Kepala Desa tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterlibatan politik perempuan masih terbatas pada aspek pemberian suara. Sementara itu, keikutsertaan mereka dalam pengambilan keputusan politik, kampanye, dan diskusi politik masih minim. Terdapat dua faktor utama yang berperan dalam membentuk tingkat partisipasi politik perempuan, yaitu faktor kultural dan struktural. Dari segi kultural, keputusan perempuan dalam berpartisipasi dalam politik sering kali dipengaruhi oleh faktor budaya, keyakinan agama, serta status sosial dan figur calon kepala desa. Sementara itu, dari perspektif struktural, kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan menjadi faktor utama yang membentuk kesadaran serta keberanian perempuan dalam berpartisipasi secara aktif dalam politik. Kesimpulannya, meskipun perempuan di Desa Domag cukup aktif dalam menggunakan hak pilihnya, keterlibatan mereka dalam aktivitas politik lainnya masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran politik dan memberdayakan perempuan agar partisipasi mereka tidak hanya terbatas pada pemungutan suara, tetapi juga mencakup keterlibatan lebih luas dalam berbagai proses politik.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Perempuan, Kendala Kultural, Tantangan Struktural

PENDAHULUAN

Dalam era demokrasi modern, partisipasi politik menjadi salah satu indikator utama kualitas sistem pemerintahan. Partisipasi politik mencerminkan tidak hanya hak asasi warga negara dalam memilih pemimpin, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, mekanisme pemilihan umum telah menjadi sarana utama untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Namun, meskipun secara normatif semua warga negara memiliki hak yang sama, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan partisipasi, terutama antara gender.

Isu gender dalam politik telah mendapatkan perhatian global seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan dalam berbagai sektor kehidupan. Meskipun perempuan telah memperoleh hak yang setara dalam pemilihan umum dan bahkan dalam pencalonan jabatan publik, partisipasi aktif mereka dalam proses politik kerap kali terbatas. Di banyak wilayah, termasuk dalam konteks pemilihan kepala desa, keterlibatan politik perempuan sering kali hanya terbatas pada pemberian hak suara, sedangkan peran mereka dalam perumusan kebijakan, kampanye, dan pengambilan keputusan strategis masih minim. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor yang menghambat peran perempuan dalam politik.

Secara kultural, norma dan nilai tradisional yang telah lama mengakar di masyarakat turut membatasi peran serta perempuan di ranah politik. Norma patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi sekunder, stereotip gender yang mengkonstruksi perempuan sebagai sosok pasif, serta penekanan pada peran domestik, menjadi hambatan signifikan yang mengurangi peluang perempuan untuk terlibat secara aktif. Di tingkat lokal, seperti pada pemilihan kepala desa, faktor-faktor kultural ini seringkali membuat perempuan dipandang sebelah mata dalam proses politik, sehingga kesempatan untuk mengemukakan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan publik menjadi terbatas.

Di samping kendala kultural, tantangan struktural juga memainkan peran penting dalam membatasi partisipasi politik perempuan. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta kurangnya jaringan politik yang mendukung, menjadi hambatan struktural yang mengurangi kemungkinan perempuan untuk tampil dan berperan dalam arena politik. Ketidakmerataan akses terhadap informasi politik dan minimnya dukungan kelembagaan juga mengakibatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat desa cenderung minim. Hal ini berdampak pada rendahnya representasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan, yang pada gilirannya memperpetuasi ketimpangan gender dalam kehidupan politik.

Berbagai studi telah mengungkapkan adanya kesenjangan gender yang signifikan dalam partisipasi politik perempuan, yang sebagian besar disebabkan oleh dominasi budaya patriarki dalam masyarakat. Struktur sosial yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai patriarki telah menciptakan hambatan bagi perempuan dalam menyalurkan hak politiknya. Dalam kehidupan sosial, perempuan sering kali diposisikan sebagai kelompok yang berada di bawah dominasi laki-laki, yang menyebabkan mereka mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek, termasuk dalam ruang politik (Wahyudi, 2018; Kiftiyah, 2019).

Lebih lanjut, pandangan lain menyoroti bagaimana stereotip gender turut memperkuat ketidaksetaraan dalam sektor politik dan pemerintahan. Perempuan kerap kali dianggap tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memimpin, dengan alasan bahwa mereka cenderung lebih emosional dan kurang rasional dibandingkan laki-laki. Stigma ini membentuk persepsi negatif yang menghambat peluang perempuan untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan politik dan menduduki posisi kepemimpinan (Pudji, 2008).

Pandangan stereotip semacam ini tidak hanya mengurangi kesempatan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga memperkuat eksklusi sistemik yang membuat akses mereka terhadap jabatan strategis semakin sulit. Selain faktor budaya dan stereotip gender, minimnya dukungan struktural, seperti akses terhadap pendidikan politik dan jaringan sosial yang kuat, semakin memperdalam kesenjangan partisipasi perempuan di sektor politik.

tantangan dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Perempuan

Dalam konteks pemilu, tantangan yang dihadapi perempuan tidak hanya sebatas hambatan budaya dan stereotip gender, tetapi juga mencakup kurangnya akses terhadap pendidikan politik dan sumber daya yang memadai untuk bersaing dalam pemilihan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pemilu, seperti meningkatkan kesadaran politik, memperkuat dukungan komunitas, serta mendorong kebijakan afirmatif yang lebih efektif.

Perdebatan mengenai peran perempuan dalam pemilu berkisar antara dorongan untuk meningkatkan partisipasi mereka dan kritik terhadap efektivitas keterlibatan tersebut dalam sistem politik yang masih didominasi laki-laki. Pendukung partisipasi politik perempuan menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus bersifat inklusif, di mana keterwakilan perempuan dapat memperkuat pengambilan keputusan yang lebih adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam politik dianggap mampu mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.

Namun, di sisi lain, terdapat kritik yang menyatakan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilu sering kali bersifat simbolis tanpa perubahan substansial dalam sistem politik yang patriarkal. Bahkan, dalam beberapa kasus, perempuan yang berhasil masuk ke arena politik tetap terkungkung oleh struktur yang

membatasi kemandirian mereka dalam pengambilan keputusan. Selain hambatan kultural, perempuan juga menghadapi tantangan struktural, seperti minimnya akses terhadap pendidikan politik dan sumber daya yang diperlukan untuk bersaing dalam pemilihan.

Berkenaan dengan hal itu, merujuk pada definisi pemilu Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan secara terbuka, dapat memberikan ruang ruang partisipasi kebebasan dalam hal politik masyarakat. (Budiarjo, 2008).

Sehingga Pemilihan umum (pemilu) dapat didefinisikan sebagai mekanisme demokratis yang memungkinkan rakyat untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan pemerintahan melalui proses pemungutan suara. Terlepas dari berbagai jenis pemilihan, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan kepala desa, esensi utama dari pemilu adalah memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik. Dalam konteks ini, yang perlu diperhatikan bukan hanya aspek prosedural dari pemilu itu sendiri, tetapi juga bentuk partisipasi politik perempuan di dalamnya. Partisipasi politik perempuan tidak hanya sebatas hak untuk memilih, tetapi juga mencakup keterlibatan mereka dalam berbagai

tahapan politik, seperti pencalonan, kampanye, diskusi kebijakan, hingga pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemilu harus dipandang sebagai momentum untuk mendorong kesetaraan gender dalam politik, memastikan perempuan tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor yang berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Beberapa teori yang dikemukakan oleh Gabriel Almond justru menunjukkan bahwa partisipasi politik dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu partisipasi konvensional dan partisipasi nonkonvensional.

1. Partisipasi politik secara konvensional

Partisipasi semacam ini mencakup keterlibatan dalam aktivitas politik yang sah dan diakui dalam sistem demokrasi, seperti membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan politik, ikut serta dalam kampanye pemilu, memberikan suara (voting), serta terlibat dalam diskusi dan debat politik. Bentuk partisipasi ini dianggap sebagai mekanisme yang terstruktur dalam sistem pemerintahan dan sering kali dijalankan dalam kerangka hukum yang berlaku.

2. Partisipasi politik

Untuk kategori partisipasi secara nonkonvensional merujuk pada keterlibatan politik yang bersifat tidak langsung atau dilakukan di

luar mekanisme formal, seperti pengajuan petisi, demonstrasi, mogok kerja, hingga aksi-aksi yang lebih radikal seperti perusakan fasilitas publik, pengeboman, atau bahkan tindakan kekerasan politik lainnya, termasuk pembunuhan. Partisipasi nonkonvensional ini sering kali muncul sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada, terutama ketika individu atau kelompok merasa bahwa aspirasi politik mereka tidak diakomodasi dalam jalur formal. (dalam, Mohtar Mas'oed, 2011).

Berkenaan dengan hal itu, Hasil observasi awal mengenai partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala desa di Desa Domag masih tergolong masih kurang. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Desa Domag antara lain faktor individu, faktor struktural, dan faktor budaya. Faktor individu mencakup kurangnya pemahaman perempuan tentang pentingnya partisipasi politik dan fokus pada tugas-tugas rumah tangga dan merawat anak-anak, yang mengurangi kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan mengambil keputusan yang independen.

Selain faktor individu, faktor struktural seperti tradisi dan budaya juga menjadi kendala dalam partisipasi politik perempuan di Desa Domag. Kebiasaan turun-temurun untuk mengikuti keputusan suami membuat sulit bagi perempuan untuk memutuskan secara mandiri

dalam hal pemilihan kepala desa. Selain itu, adat di Desa Domag membatasi perempuan dalam hal partisipasi politik. Kurangnya pendidikan dan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan politik juga menjadi kendala dalam partisipasi politik perempuan di Desa Domag.

Hasil observasi mengenai partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala desa di Desa Domag menunjukkan bahwa partisipasi mereka masih tergolong rendah. Jika dikaitkan dengan teori mengenai bentuk partisipasi politik, yaitu konvensional dan nonkonvensional, tampak bahwa perempuan di Desa Domag lebih banyak berada pada posisi pasif dalam kategori konvensional, yakni hanya sebatas memberikan suara (voting). Keterlibatan mereka dalam kegiatan politik lain, seperti bergabung dalam kelompok kepentingan politik, mengikuti kampanye, atau berpartisipasi dalam diskusi politik, masih sangat terbatas. Hal ini menandakan bahwa perempuan di Desa Domag belum sepenuhnya mengambil peran aktif dalam dinamika politik desa mereka.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik perempuan ini dapat dikategorikan dalam tiga aspek utama: individu, struktural, dan budaya. Faktor individu mencakup minimnya pemahaman perempuan mengenai pentingnya keterlibatan politik, serta beban domestik yang membuat mereka lebih fokus pada tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. Dalam konteks ini, perempuan tidak memiliki cukup waktu dan ruang untuk aktif dalam proses politik. Faktor struktural, seperti sistem sosial yang patriarkal,

juga turut membatasi peran perempuan. Tradisi yang mengharuskan perempuan mengikuti keputusan suami dalam memilih pemimpin menjadi hambatan besar bagi kemandirian politik mereka. Sementara itu, faktor budaya juga memperkuat dominasi laki-laki dalam politik, di mana norma-norma adat di Desa Domag masih membatasi perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang politik secara aktif.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi politik nonkonvensional, partisipasi perempuan di Desa Domag hampir tidak tampak dalam bentuk ini. Tidak ditemukan adanya gerakan petisi, demonstrasi, atau bentuk lain dari ekspresi politik yang lebih kritis. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran politik perempuan di Desa Domag masih perlu ditingkatkan agar mereka tidak hanya sekadar menjadi pemilih pasif, tetapi juga mampu mengambil peran yang lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan di tingkat desa.

Oleh karena itu, kajian ini lebih menitikberatkan pada analisis bentuk partisipasi politik perempuan di Desa Domag dalam pemilihan kepala desa tahun 2020, yang mencakup keterlibatan mereka dalam memberikan suara (voting), mengikuti kampanye, dan berpartisipasi dalam diskusi politik. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi kendala kultural dan struktural yang memengaruhi tingkat partisipasi politik perempuan di desa tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2008)

metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami cara pandang subjek penelitian yang tidak dapat diukur dengan angka-angka statistik. Metode ini menghasilkan data dalam bentuk deskripsi, baik berupa ucapan, tulisan, maupun perilaku yang diamati dari subjek penelitian.

Dalam studi mengenai partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala desa, metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, mengkaji berbagai permasalahan, serta menggambarkan dan merinci fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara komprehensif. Dengan demikian, temuan yang dihasilkan dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi nyata yang diamati.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, dengan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala desa, sedangkan wawancara menggali perspektif para partisipan terkait faktor yang memengaruhi keterlibatan mereka. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian, sementara data sekunder berasal dari dokumen, laporan, dan literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Partisipasi Politik Perempuan di Desa Domag Mekar

Indikator bentuk partisipasi politik perempuan pada penelitian ini mengacu pada tiga bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh perempuan dalam pemilihan kepala Desa

Domag Mekar Kabupaten Buol pada tahun 2020. Bentuk partisipasi pertama adalah pemberian hak suara atau yang lebih dikenal dengan istilah voting. Dalam hal ini, partisipasi politik perempuan diukur melalui jumlah perempuan yang memberikan suara pada hari pemilihan kepala desa.

Adapun tingkat partisipasi politik perempuan dalam bentuk ini sangat penting karena menunjukkan sejauh mana perempuan memanfaatkan hak politiknya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

Bentuk partisipasi politik kedua adalah keikutsertaan dalam kampanye politik. Dalam hal ini, partisipasi politik perempuan diukur melalui jumlah perempuan yang terlibat secara aktif dalam kampanye politik calon kepala desa tertentu. Keikutsertaan perempuan dalam kampanye politik dapat meningkatkan tingkat kesadaran politik di kalangan perempuan serta memperkuat suara dan representasi perempuan dalam politik lokal.

Bentuk partisipasi politik ketiga adalah terlibat dalam diskusi-diskusi politik. Dalam hal ini, partisipasi politik perempuan diukur melalui jumlah perempuan yang terlibat dalam diskusi politik di tingkat desa terkait dengan berbagai isu yang berkaitan dengan pengambilan keputusan politik. Terlibat dalam diskusi politik dapat membantu perempuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mereka tentang isu-isu politik yang ada di desa mereka serta memperkuat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik.

Secara keseluruhan, ketiga bentuk partisipasi politik perempuan ini sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan di tingkat desa. Dengan meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemberian hak suara, keikutsertaan dalam kampanye politik, dan terlibat dalam diskusi politik, dapat meningkatkan peran dan representasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik di tingkat desa serta memperkuat kepercayaan dan keabsahan dari hasil pemilihan kepala desa yang di gambarkan melalui point-point berikut ini:

1. Keterlibatan dalam Voting

Voting atau memberikan suara pada pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang sangat penting bagi perempuan di Desa Domag. Dalam pemilihan kepala desa, peran perempuan sebagai pemilih sangat menentukan kesuksesan pelaksanaan pilkades. Oleh karena itu, keterlibatan aktif perempuan dalam memberikan suara pada hari pencoblosan sangatlah penting. Dalam konteks yang lebih luas, partisipasi politik perempuan dalam pilkades juga merupakan bentuk dukungan terhadap pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Dengan memberikan suara, perempuan dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan pada proses demokrasi yang sedang berjalan di Desa Domag.

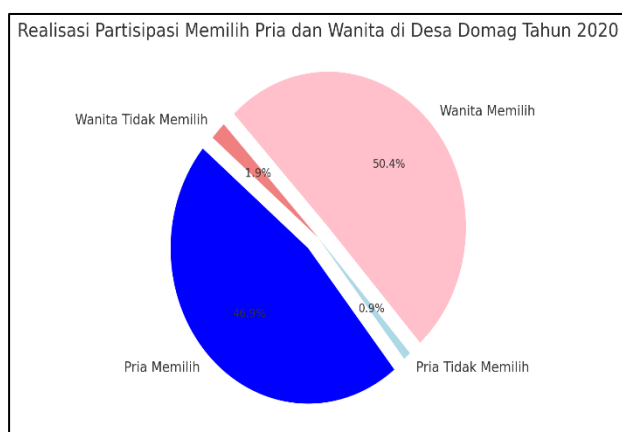
Adapun hasil dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa domag tahun 2020 khususnya keterlibatan dalam voting ditemukan bahwa meskipun sedang terjadi situasi pandemi Covid-19 yang membatasi berbagai aktivitas, partisipasi perempuan dalam dalam

memberikan hak suara (voting) pemilihan kepala desa di Desa Domag tahun 2020 terbilang cukup tinggi. Hasil wawancara dengan beberapa ibu rumah tangga di desa tersebut menunjukkan bahwa para ibu-ibu sangat antusias dalam memberikan hak suara mereka, baik yang masih berstatus remaja dan memiliki hak pilih maupun yang sudah berkeluarga atau masuk dalam kategori lansia.

Meskipun begitu, ada beberapa perempuan yang tidak memberikan suaranya pada pemilihan kepala desa tahun 2020. Yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.

Realisasi Partisipasi Memilih Pria dan Wanita di Desa Domag Tahun 2020



Sumber: Pemerintah Desa Domag (Olahan Data, 2025)

Partisipasi politik dalam pemilihan merupakan indikator penting dalam menilai kesadaran demokrasi suatu masyarakat. Berdasarkan data partisipasi pemilih di Desa Domag tahun 2020, terlihat bahwa dari total 796 pemilih, 774 orang (97,2%) menggunakan hak pilihnya, sementara 22 orang (2,8%) tidak memilih. Jika dianalisis lebih dalam, terdapat beberapa aspek yang dapat dikaji terkait

kecenderungan partisipasi pemilih berdasarkan jenis kelamin.

a) Tingkat Partisipasi Lebih Tinggi pada Pemilih Wanita

Dari total pemilih, wanita yang memilih sebanyak 401 orang (50,4%), sedangkan pria yang memilih sebanyak 373 orang (46,9%). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi wanita dalam pemilu di Desa Domag lebih tinggi dibandingkan pria. Fenomena ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran politik di kalangan wanita, peran sosial yang lebih kuat dalam komunitas, serta pengaruh program-program pemberdayaan perempuan yang mendorong mereka untuk lebih aktif dalam kehidupan demokrasi.

b) Rendahnya Tingkat Golput

Tingkat ketidakhadiran pemilih atau golput di Desa Domag terbilang sangat rendah, yaitu hanya 2,8% dari total pemilih. Jumlah pria yang tidak memilih hanya 7 orang (0,9%), sementara wanita yang tidak memilih sebanyak 15 orang (1,9%). Persentase ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Domag memiliki kesadaran politik yang tinggi dan merasa bahwa suara mereka memiliki dampak dalam proses demokrasi.

Temuan yang lain menunjukkan bahwa Data diatas menmeberikan gambaran atas beberapa perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa di antaranya karena berdomisili di

luar desa atau terkendala oleh aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan saat itu. Namun, secara umum partisipasi perempuan dalam memberikan hak suara di Desa Domag terbilang cukup responsif. Selain itu, informasi dari mantan Ketua penyelenggara pemilihan kepala desa juga menunjukkan bahwa partisipasi perempuan cukup tinggi meskipun tidak semua perempuan di desa tersebut memilih. Menurutnya, hal ini menunjukkan kesadaran dan antusiasme yang tinggi dari perempuan di Desa Domag dalam melaksanakan hak suara mereka dalam pemilihan kepala desa.

2. Keterlibatan dalam Kampanye Politik.

Partisipasi perempuan dalam kampanye politik khususnya dalam pilkades masih menjadi masalah kompleks yang sering diabaikan. Meskipun perempuan memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan politiknya, termasuk dalam pilkades, namun banyak kendala yang dihadapi, terutama di wilayah pedesaan. Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya informasi dan edukasi yang diberikan oleh panitia penyelenggara. Media yang disediakan seringkali tidak efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara detail dan mendalam tentang visi dan misi calon kepala desa. Hal ini mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang calon kepala desa, sehingga pilihan politik yang diambil tidak didasarkan pada informasi yang akurat. Selain itu, kampanye politik seringkali hanya dilakukan untuk menarik minat pemilih, tanpa memberikan edukasi politik yang memadai.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan kampanye politik khususnya

pemilihan kepala desa tahun 2020 masih rendah. Informan- informan tersebut mengungkapkan bahwa mereka belum pernah terlibat dalam kampanye politik dan tidak mendapatkan edukasi dari panitia penyelenggara. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan kampanye politik.

Selain itu, kurangnya edukasi dan informasi yang disampaikan oleh panitia penyelenggara juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan kampanye politik di Desa Domag. Sebagai contoh, panitia penyelenggara tidak memberikan informasi yang cukup tentang proses kampanye politik, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh anggota tim pemenangan atau panitia kampanye, dan juga hak-hak politik yang dimiliki oleh perempuan. Selain itu, informan juga mengemukakan bahwa dalam tim pemenangan atau panitia kampanye yang terlibat, jumlah perempuan masih sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pandangan stereotip bahwa politik adalah ranah laki-laki, sehingga perempuan kurang terlibat dalam kampanye politik. Kurangnya keterwakilan perempuan dalam tim pemenangan atau panitia kampanye juga dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perempuan dalam politik.

3. Keterlibatan dalam Diskusi Politik.

Beranjak dari penentuan hak politik dan keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan kampanye politik, bentuk selanjutnya yang patut untuk diperhatikan adalah keterlibatan perempuan dalam diskusi politik di Desa Domag sendiri. hasil penelitian menunjukan

bahwa keterlibatan perempuan dalam diskusi politik khususnya pemilihan kepala desa di Desa Domag tahun 2020 tergolong rendah. Sebagian besar perempuan tidak terlibat dalam diskusi politik tersebut, namun ada beberapa yang terlibat melalui suami atau mendapatkan informasi dari tetangga. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih mengandalkan pria dalam masalah politik.

Hal tersebut terlihat dari pernyataan beberapa informan menyatakan bahwa pandemi COVID-19 juga menjadi faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik tersebut. Pandemi ini membuat perempuan lebih memilih untuk membantu suami di kebun atau fokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih memiliki beban yang lebih besar dalam mengurus keluarga dan pekerjaan rumah tangga, sehingga mengurangi waktu mereka untuk terlibat dalam diskusi politik.

Tidak hanya faktor pandemi, masih ada faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam diskusi politik. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan kesempatan yang diberikan oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Masyarakat dan pemerintah setempat perlu memberikan kesadaran dan kesempatan yang sama kepada perempuan untuk terlibat dalam diskusi politik, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam mengambil keputusan dan memberikan pandangan mereka dalam masalah politik.

Selain itu, pendidikan dan pengetahuan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam diskusi politik. Perempuan yang memiliki

pendidikan dan pengetahuan yang baik akan lebih berani untuk terlibat dalam diskusi politik dan mengambil keputusan yang tepat untuk diri mereka dan keluarganya hal tersebut terlihat dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa mereka masih awam akan diskusi politik.

Faktor-Faktor Yang Menentukan Partisipasi Politik Perempuan di Desa Domag Mekar.

Keterlibatan perempuan dalam menyalurkan hak politiknya seringkali dihambat oleh sejumlah faktor baik di lingkungan internal maupun eksternal. Adapun faktor yang dimaksud oleh peneliti adalah hal-hal yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala Desa Domag Mekar Kabupaten Buol. Pada dasarnya perempuan memiliki jiwa semangat yang relatif stabil ketika diperhadapkan dengan suatu persoalan yang menyangkut dengan harkat dan martabatnya. Namun, perempuan akan lebih cenderung melemah ketika berhadapan dengan situasi hak politiknya apabila dalam keadaan dipengaruhi. Berkenaan dengan hal itu, pendekatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor yang menentukan partisipasi politik perempuan didasarkan pada dua hal yakni, dilihat secara kultural dan struktural yang terurai pada hasil temuan pada sub-sub point berikut.

1. Faktor Kultural

Faktor kultural dalam konteks partisipasi politik perempuan lebih merujuk pada faktor-faktor budaya, agama, dan gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan dan preferensi politik seseorang. Hal

ini berarti bahwa partisipasi politik seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi atau struktural semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kultural yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, faktor kultural dalam konteks partisipasi politik perempuan juga mengasumsikan bahwa preferensi politik seseorang dipengaruhi oleh karakteristik sosio-ekonomi seperti pekerjaan, kelas sosial, agama, dan ideologi. Dalam masyarakat yang memiliki kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar, partisipasi politik seseorang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Misalnya, perempuan yang berasal dari keluarga miskin mungkin memiliki prioritas dan kebutuhan yang berbeda dengan perempuan yang berasal dari keluarga kaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa keikutsertaan perempuan dalam pemilihan kepala desa masih terbatas, karena banyak dari mereka yang mengandalkan rekomendasi dari suami dalam memilih calon kepala desa. Ini menunjukkan bahwa peran suami masih memiliki pengaruh besar dalam keputusan politik keluarga, sehingga menghambat partisipasi politik perempuan. Selain itu, pendidikan juga menjadi faktor penting dalam memilih calon kepala desa. Beberapa informan menyatakan bahwa calon kepala desa yang memiliki pendidikan yang bagus akan lebih dipilih, karena dianggap mampu memberikan kemajuan bagi desa tersebut. Namun, ada juga informan yang menyatakan bahwa meskipun pendidikan penting, namun akhlak dan kemampuan untuk memahami kondisi masyarakat juga menjadi

faktor yang tidak kalah penting dalam memilih calon kepala desa.

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di Desa Domag tidak hanya memilih calon kepala desa berdasarkan faktor kultural, tetapi juga berdasarkan kualifikasi calon kepala desa. Namun, peran suami dan nilai-nilai kultural masih menjadi faktor penting dalam pemilihan kepala desa, sehingga perlu adanya upaya untuk mengubah persepsi dan meningkatkan partisipasi politik perempuan secara keseluruhan. Selain faktor kultural dan kualifikasi, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kemampuan calon kepala desa dalam menjawab masalah masyarakat menjadi faktor penting dalam pemilihan kepala desa. Beberapa informan menyatakan bahwa calon kepala desa yang mampu menjawab masalah masyarakat seperti masalah pertanian, ekonomi, dan lain sebagainya lebih dipilih, karena dianggap mampu memberikan solusi bagi masyarakat.

Namun, meskipun pemilihan kepala desa berdasarkan kualifikasi dan kemampuan dalam memimpin menjadi penting, tetap saja faktor kultural masih mempengaruhi pemilihan kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kompleksitas dalam partisipasi politik perempuan, di mana faktor kultural, kebijakan, dan pendidikan harus diperhatikan secara bersamaan agar partisipasi politik perempuan dapat meningkat secara signifikan.

2. Faktor Struktural

Faktor struktural dalam pemilihan kepala desa adalah hal yang sangat penting, terutama bagi partisipasi politik perempuan. Faktor struktural tersebut terdiri dari faktor internal dan eksternal perempuan dalam

bermasyarakat, seperti identifikasi partai orientasi kandidat dan orientasi isu/tema. Dalam konteks ini, identifikasi partai digunakan sebagai alat untuk mengukur faktor predisposisi pribadi maupun politik, seperti pengalaman pribadi atau orientasi politik yang relevan bagi individu, terutama perempuan.

Pengalaman pribadi dan orientasi politik dapat berperan dalam membentuk identitas politik perempuan. Identitas politik ini sering diwariskan oleh orang tua, tetapi dapat dipengaruhi oleh lingkungan, ikatan perkawinan, dan situasi krisis yang dialami oleh perempuan. Misalnya, perempuan yang berasal dari keluarga politik atau aktif dalam organisasi sosial biasanya memiliki orientasi politik yang lebih kuat daripada perempuan yang tidak memiliki latar belakang politik.

Dalam konteks pemilihan kepala desa, faktor struktural dapat mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Peran perempuan dalam memilih kepala desa seringkali dibatasi oleh faktor budaya dan tradisi yang masih kuat. Di banyak daerah, perempuan masih dianggap sebagai pihak yang tidak terlalu terlibat dalam kegiatan politik dan lebih berperan dalam mengurus rumah tangga dan keluarga. Hal ini menyebabkan perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memilih kepala desa.

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala desa di Desa Domag masih terbatas pada aspek voting, sedangkan keterlibatan dalam diskusi politik, kampanye, serta pengambilan keputusan masih sangat rendah. Dalam menganalisis temuan ini, teori partisipasi

politik Gabriel Almond dapat digunakan sebagai kerangka konseptual. Almond membagi partisipasi politik ke dalam tiga kategori: parochial (parokial), subject (subjek), dan participant (partisipan).

Dalam konteks Desa Domag, partisipasi politik perempuan cenderung berada dalam kategori subject political culture. Artinya, perempuan memiliki kesadaran akan sistem politik dan hak suara mereka, tetapi keterlibatan mereka masih terbatas pada aspek formal seperti pemberian suara tanpa adanya partisipasi aktif dalam proses politik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di desa tersebut belum mencapai tingkat participant political culture, di mana mereka terlibat secara aktif dalam berbagai aspek politik, seperti kampanye, diskusi, hingga advokasi kebijakan.

Dua faktor utama yang menjadi penghambat, yaitu faktor kultural dan struktural, semakin memperkuat kecenderungan ini. Faktor kultural seperti nilai-nilai patriarki, kepercayaan agama, serta norma sosial masih membentuk persepsi bahwa peran politik lebih dominan bagi laki-laki. Dalam perspektif Almond, kondisi ini mencerminkan masyarakat dengan budaya politik yang belum sepenuhnya demokratis, di mana peran politik masih ditentukan oleh faktor tradisional. Sementara itu, faktor struktural, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya politik, juga menghambat perempuan dalam berpartisipasi lebih aktif.

Dalam konteks pemilu, teori Almond juga menekankan pentingnya sosialisasi politik sebagai mekanisme untuk meningkatkan

kesadaran politik masyarakat. Rendahnya keterlibatan perempuan di Desa Domag menunjukkan lemahnya proses sosialisasi politik yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan. Jika sosialisasi politik lebih dioptimalkan, maka perempuan dapat bertransisi dari kategori subject menjadi participant, sehingga keterlibatan mereka dalam politik tidak hanya sebatas memilih tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan.

Temuan penelitian ini dapat dianalisis menggunakan teori patriarki dan literasi politik, di mana budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia menciptakan kontradiksi dalam posisi gender dalam pengambilan keputusan politik, sehingga perempuan sering kali menghadapi bias negatif terhadap hak mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik (Sahi et al., 2023). Doktrin patriarki yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial menyebabkan pembatasan peran perempuan dalam politik, baik secara eksplisit melalui norma sosial maupun secara implisit melalui ekspektasi gender yang mengutamakan laki-laki dalam ruang publik dan pengambilan keputusan (Kamuli, Latare, & Sahi, 2023).

Selain itu, rendahnya tingkat literasi politik perempuan juga menjadi faktor utama yang membatasi keterlibatan mereka dalam sistem demokrasi, di mana pemahaman tentang hak partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh akses terhadap pendidikan politik dan kesadaran akan pentingnya pengawasan partisipatif, yang pada akhirnya menentukan sejauh mana perempuan dapat berperan dalam

politik desa (Alhadar, Sahi, & Katili, 2024). Namun, partisipasi politik perempuan masih terhambat oleh stigma negatif dalam politik elektoral, yang tidak hanya memengaruhi persepsi mereka terhadap politik tetapi juga membentuk hambatan psikologis dan sosial yang membuat perempuan enggan terlibat dalam kampanye, diskusi politik, dan pengambilan keputusan (Sahi, Mahmud, & Hamim, 2024). Dalam analisis ini, aspek kognitif dan afektif juga turut berperan, di mana aspek kognitif mencerminkan pemahaman dan kesadaran politik yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan, sosial, dan budaya, sedangkan aspek afektif berkaitan dengan keterlibatan emosional serta persepsi individu terhadap politik, yang sering kali dipengaruhi oleh norma gender dan stereotip sosial yang melekat dalam masyarakat (Kamuli, Latare, & Sahi, 2023). Oleh karena itu, meskipun perempuan di tingkat desa telah aktif dalam menggunakan hak pilihnya, keterlibatan mereka dalam aspek politik yang lebih luas masih terkendala oleh faktor budaya, struktural, serta rendahnya literasi politik yang semakin memperkuat dominasi patriarki dalam sistem politik lokal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan data lapangan yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam pemilihan kepala desa di Desa Domag terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu partisipasi langsung (konvensional) dan partisipasi tidak langsung (non-konvensional). Partisipasi konvensional mencakup keterlibatan aktif dalam proses politik seperti

kampanye, diskusi politik, dan pengambilan keputusan, sedangkan partisipasi non-konvensional merujuk pada keterlibatan yang lebih pasif, seperti memberikan suara tanpa keterlibatan lebih lanjut dalam proses politik.

Selain itu, hasil juga menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di Desa Domag masih sangat terbatas, di mana keterlibatan mereka lebih dominan dalam aspek pemberian hak suara. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, tingkat partisipasi mereka tergolong cukup baik. Namun, jika ditinjau secara kualitatif, keterlibatan perempuan dalam aspek lain, seperti menentukan arah kebijakan politik, berpartisipasi dalam kampanye, serta aktif dalam diskusi politik, masih tergolong rendah.

Lebih lanjut, terdapat dua faktor utama yang memengaruhi tingkat partisipasi politik perempuan, yaitu faktor kultural dan faktor struktural. Dari aspek kultural, partisipasi politik perempuan sering kali dipengaruhi oleh norma sosial yang masih berorientasi pada budaya patriarki, di mana peran politik lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Keyakinan masyarakat yang berlandaskan kesamaan budaya, agama, serta status sosial calon kepala desa turut menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pilihan politik perempuan. Sementara itu, dari aspek struktural, keterlibatan perempuan dalam politik juga dipengaruhi oleh faktor internal dalam keluarga, seperti keputusan yang lebih banyak ditentukan oleh suami atau orang tua, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan politik dan informasi yang lebih luas.

Dengan demikian, meskipun perempuan di Desa Domag telah menggunakan hak pilihnya, partisipasi mereka dalam aspek politik lainnya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis untuk mengatasi hambatan kultural dan struktural yang masih membatasi peran perempuan dalam politik, termasuk melalui peningkatan edukasi politik, penyadaran akan hak-hak politik perempuan, serta penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhadar, S., Sahi, Y., & Katili, P. P. (2024). Penguatan Demokrasi Dan Pemilu Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024:(Studi Pengabdian Pada Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo). *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1115-1123.
- Kamuli, S., Latore, S., & Sahi, Y. (2023). Implikasi Konflik Partai Politik Terhadap Paradigma Pemilih Pemula Menjelang Pemilu 2024: Studi Pada Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 3158-3170.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14 (1), 1-13.

-
- Moleong, Lexy J. (2008). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mohtar Mas'ood, C. M. (2011). Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miriam Budiarjo. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik: Edisi Pertama. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Pudji, T. M. (2008). Citra Perempuan dalam politik. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 3(1), 3-16.
- Sahi, Y., Mahmud, R., & Hamim, U. (2024). Political Preferences of Voters with Disabilities in the 2024 Elections: Values, Perceptions, Trends and Satisfaction Vs Ideological Values and Group Strength. Journal of Law, Politics and Humanities, 5(1), 632-646.
- Sahi, Y., Jama, S., Hulubangga, A., & Kaaba, A. (2023). Pergulatan Doktrin Politik Nahdlatul Ulama:(Refleksi Masa Kolonial Belanda, Jepang, Era Kemerdekaan, Orde Baru Hingga Pasca Reformasi Di Indonesia). JURNAL POLAHI, 1(1).
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. Politea: Jurnal Politik Islam, 1(1), 63-83